



Rencana Kerja (RENJA)

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang

Tahun 2023




FORMAT PENGENDALIAN
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

PERANGKAT DAERAH : **BKAD KABUPATEN SUMEDANG**

NO	URAIAN	POKOK-POKOK MATERI	KESESUAIAN		CATATAN
			ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				
2	Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :				
BAB I PENDAHULUAN					
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.	✓		
	1.2. Landasan Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	✓		
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	✓		
	1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	✓		
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021					
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (disajikan dalam Tabel 2.1)	Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I, dengan pokok-pokok materi yang disajikan antara			
		a. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan		✓	Bilengkap
		b. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;		✓	— — —
		c. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;		✓	— — —
		d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;		✓	— — —
		e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan		✓	— — —
		f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.		✓	— — —
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (disajikan dalam Tabel 2.2)	Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006	✓		
	2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;			
		b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat			Sesuai
		c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)			dengan
		d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan			Sistematika
		e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan			
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, (disajikan dalam Tabel 2.3)	a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan;			uraian
		b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;			Sesuai
		c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda			Sistematika
	2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Masyarakat, (Hasil Musrenbang, meliputi usulan PIK, PI PD, Hibah dan Bansos) disajikan dalam Tabel 2.4	Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/ usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;	✓		
		Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;	✓		

NO	URAIAN	POKOK-POKOK MATERI	KESESUAIAN		CATATAN
			ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5	6
	BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH				
	3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	✓		
	3.3. Program, Kegiatan dan sub kegiatan	<p>a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan</p> <p>Misal:</p> <p>e. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian SDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian NSPK dan SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir, g. Dsb</p> <p>b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:</p> <p>1. Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan</p> <p>2. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)</p> <p>3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya</p> <p>c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya</p> <p>d. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33</p>			Susunan uraian lengkap
	BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	Rumusan Rencana Program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan Tahun 2023 (Excel Rinci yang sesuai dengan hasil Input SIPD) Tabel IV.1	✓		Tabel T.C 33
	BAB V : PENUTUP	<p>a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.</p> <p>c. Rencana tindak lanjut, pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.</p>		✓	lengkap & sesuai & sistematis
3	TABEL - TABEL				
	Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022	ditandatangani Kepala Perangkat Daerah	✓		Perbaiki
	Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		✓		
	Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023		✓		
	Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023		✓		
	Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Sumedang	Format sesuai hasil Cetak Renja dalam SIPD	✓		
	Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023	Format Excel rancangan akhir program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas Sub Kegiatan dengan berbagai sumber pendanaan Tahun 2023	✓		

TIM VERIFIKASI



Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
Kabupaten Sumedang

Perangkat Daerah : **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra- Perangkat Daerah	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		✓	Tidak adanya keterkaitan antara program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati Sumedang	✓			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 yang telah disahkan.	✓			

Sumedang, Juli 2022
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang.


Ir. INE INAJAH, MSE., M.Sc
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP 19690315 199901 2 001

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 yang dihadiri Tim Penyusun, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah, **terlampir**.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

Kesatu	:	Sistematika Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 telah memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan lampiran C.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah memuat: 1) program, kegiatan dan sub kegiatan; 2) lokasi kegiatan; 3) indikator kinerja; dan 4) pagu indikatif dan prakiraan maju;
Kedua	:	Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dengan prakiraan target Tahun 2024 yang diestimasikan;
Ketiga	:	Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 yang telah diverifikasi akan dijadikan lampiran Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fungsional Perencana Ahli Muda
Bappppeda Kab. Sumedang

NANDANG MU'MIN, SE., M.M

NIP. 19700903 200701 1 008

Tim Verifikasi

RATIH YUNIARTI, SE., M.Si

NIP. 19770604 200701 2 011

Mengetahui,

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kab. Sumedang
Kepala,

Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19690212 198903 2 005

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang
Kepala,

Ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc.

Pembina Tk. I
NIP. 19690315 199901 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya pula kami dapat menyusun Dokumen Rencana Awal Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023. Sehubungan hal tersebut penyusunan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan Tahun 2021.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumedang khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga target capaian yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai harapan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, amiin.

Sumedang, Juli 2022
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang



Ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc

Pembina TK.I/ IV.b

NIP. 19690315 199901 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dan Capaian Reanstra Tahun 2018- 2023	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	33
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD	...	35
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKAD	61
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	61
3.3. Program dan Kegiatan	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	80
4.1. Rencana Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	80
4.2. Rencana Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	80
BAB V PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 Kabupaten Sumedang	24
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	34
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 Kabupaten Sumedang	42
Tabel 2.4. Usulan Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Aktivitas Sub Kegiatan Tahun 2023 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	50
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	69
Tabel 4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sebelum ditetapkan Peraturan Bupati, bernomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja BKAD
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja BKAD
 - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Penyusunan Rancangan Renja BKAD
 - Pengolahan data dan informasi
 - Analisis gambaran pelayanan BKAD
 - Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2021
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD
 - Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran
 - Telaahan usulan program dan kegiatan
 - Perumusan kegiatan prioritas
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja BKAD
 - Penyempurnaan rancangan Renja BKAD
 - Pembahasan forum SKPD
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan
- c. Pelaksanaan Forum SKPD

Forum SKPD bertujuan untuk :

 - Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan BKAD sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD
 - Menyelaraskan program dan kegiatan dengan SKPD lain dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
 - Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif BKAD Tahun Anggaran 2023
- d. Penyusunan dan Penetapan Renja BKAD Tahun 2023
 - Penyusunan Dokumen Rencana Kerja BKAD Tahun 2023
 - Asistensi dan Verifikasi Dokumen Renja
 - Pengesahan oleh Kepala Daerah

- Penetapan Renja oleh Kepala BKAD

Rencana Kerja BKAD Tahun 2023 memuat mengenai rencana kerja BKAD yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang disusun berdasarkan acuan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan Perubahan Rencana Strategis BKAD Tahun 2018-2023 serta RKPD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, khususnya dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selain itu, Rencana Kerja Tahun 2023 pun didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan Renja ini pun memiliki kesesuaian dengan Renstra Kementerian Keuangan yaitu dalam hal mendorong efektifitas tata kelola keuangan dan penguatan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan.

Dokumen Renja yang disusun merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, LAPKON, REVIU LAKIP;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor ..);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
45. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
49. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Sumedang Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 111);
50. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114);
51. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian dan Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 194);
52. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang. (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 2);
53. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
54. Keputusan Bupati Sumedang Nomor Tahun 2022 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023 khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini antara lain adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

1. Sebagai arah kebijakan dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Sebagai indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BKAD Kabupaten Sumedang 1 (satu) tahun kedepan;

2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Menjelaskan arah kebijakan yang akan dilaksanakan;
4. Mengetahui peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah;
5. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dengan berbagai pihak.
6. Menjabarkan proses perencanaan sehingga implementasi dari suatu kegiatan akan lebih mudah.
7. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada pejabat dan staf Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang visi dan misi badan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut.
8. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat dan staf di Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman.
9. Memudahkan pejabat/staf Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja BKAD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, Renstra Kementerian Keuangan serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya tentang SOTK dan Tugas Pokok dan Fungsi BKAD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BKAD Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja BKAD Tahun 2023 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dan Capaian Renstra BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2018- 2023

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BKAD 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BKAD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKAD Kabupaten Sumedang
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKAD berdasarkan Indikator RPJMD dan Indikator Rencana Program SKPD dalam RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BKAD.
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Sumedang
Berisikan mengenai:
 - a. *Tingkat kinerja pelayanan BKAD*
 - b. *Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BKAD*
 - c. *Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018- 2023*
 - d. *Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BKAD*
 - e. *Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023*
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023
Menjelaskan tentang kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKAD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKAD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2023
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2023
 1. Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 4.1. Rencana Program Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 4.2. Rencana Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKAD
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2023, selain mengacu pada Renstra BKAD, juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD pada tahun 2021, karena hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan perencanaan BKAD pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang No. 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang keuangan. yang dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, salah satu indikator yang menjadi ukuran tingkat kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari tertibnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih 8 kali secara berturut- turut yaitu dari tahun 2015 untuk laporan keuangan tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 untuk laporan keuangan tahun 2021 dan Penetapan APBD Tepat Waktu yang telah diraih 6 kali secara berturut- turut yaitu dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Evaluasi adalah proses penilaian, pengumpulan, dan pengamatan dari berbagai macam data untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu pelaksanaan program, kegiatan atau proses. Sehingga evaluasi sangat penting untuk dilaksanakan guna mengetahui capaian kinerja atau realisasi kinerja pada suatu instansi pemerintahan.

- a. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai 3 Program, 14 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan. Dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah semua telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan.

- b. Realisasi program/ kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 9 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 152.919.237.733. Pada tahun 2021 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja program tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada program tersebut sudah terrealisasi dengan baik.

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai 6 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 271.000.000. Pada tahun 2021 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 95,73% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 120.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 96,46% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD dengan alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp. 20.000.000 sedangkan di APBD Perubahan sebesar Rp. 0 sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 7.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 6.824.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 117.176.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 93,75% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan mempunyai 2 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 147.664.999.733. Pada tahun 2021 Kegiatan Administrasi Keuangan mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 hanya mencapai 55,59% dikarenakan sisa gaji PPPK dan CPNS serta iuran kesehatan JKK, JKN yang tidak terserap seluruhnya.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran Rp. 147.572.129.733. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyediaan Gaji dan

- Tunjangan ASN mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 55,57% dikarenakan sisa gaji PPPK dan CPNS serta iuran kesehatan JKK, JKN yang tidak terserap seluruhnya .
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 92.870.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 93,81% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah mempunyai 1 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 153.060.000. Pada tahun 2021 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 96,77% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 153.060.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD mempunyai target kinerja 99,96% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 96,77% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah mempunyai 1 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 153.060.000 pada anggaran murni, sedangkan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 0 sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
 5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mempunyai 4 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 205.580.000. Pada tahun 2021 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 97,18% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 30.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.

- 3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan alokasi anggaran Rp. 35.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 4) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran Rp. 120.580.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 95,19% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai 9 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 1.311.359.000. Pada tahun 2021 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 95,15% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 26.716.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 99,15% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 225.139.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 99,62 % yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran Rp. 48.992.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 179.810.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran Rp. 230.581.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 99,31% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.

- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran Rp. 36.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 91,35% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 502.121.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 98,99% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 8) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 98,00% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 9) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 37.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 2 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 428.100.000. Pada tahun 2021 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 94,82% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran Rp. 324.390.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Pengadaan Mebel mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 99,56% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 103.710.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 79,99% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 2 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 2.040.530.000. Pada tahun 2021 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021

mencapai 99,03% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran Rp. 483.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 97,32% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor dengan alokasi anggaran Rp. 1.557.530.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 99,56% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 5 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 844.609.000. Pada tahun 2021 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 98,20% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran Rp. 242.570.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 95,56% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebeldengan alokasi anggaran Rp. 13.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Pemeliharaan Mebel mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 165.750.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 98,63% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 51.929.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 98,37% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.

- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 371.360.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 99,66% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
- B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai 4 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 4.404.790.375. Pada tahun 2021 Program Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja program tersebut pada tahun 2021 mencapai 94,67% yang artinya target daripada program tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah mempunyai 12 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 2.626.367.425. Pada tahun 2021 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 94,98% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan alokasi anggaran Rp. 241.665.250. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 92,06% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan alokasi anggaran Rp. 188.285.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 97,41% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 152.100.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 93,67% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 119.429.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 97,25% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 227.563.750. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD mempunyai target kinerja 100% dan

- realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 92,04% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 136.440.500. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 87,48% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan alokasi anggaran Rp. 282.238.175. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 93,07% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 8) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan alokasi anggaran Rp. 362.577.500. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 96,26% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 9) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan alokasi anggaran Rp. 511.708.150. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 97,18% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 10) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dengan alokasi anggaran pada APBD Murni sebesar Rp. 91.683.350 sedangkan pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0 sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
 - 11) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 404.360.100. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 96,98% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 12) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan dengan alokasi anggaran pada APBD Murni sebesar Rp. 38.600.000 sedangkan pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0 sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah mempunyai 7 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 894.371.000. Pada tahun 2021 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 88,82% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 195.505.650. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 96,28% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 2) Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan alokasi anggaran Rp. 76.621.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 86,82% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 69.239.600. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 90,46% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp. 38.710.500 sedangkan pada APBD perubahan berkurang menjadi Rp. 0 sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dengan alokasi anggaran Rp. 343.922.500. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 87,99% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 6) Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 44.989.250.

Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 76,46% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.

- 7) Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 164.093.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 85,29% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai 11 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 884.051.950. Pada tahun 2021 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 99,68% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 47.766.100. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan alokasi anggaran Rp. 75.799.500. Pada tahun 2021 sub kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan alokasi anggaran Rp. 101.999.600. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 99,92% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 4) Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 160.890.900. Pada tahun 2021 sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai target kinerja 100%

- dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 99,78% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 106.444.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 6) Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran Rp. 9.168.250. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 7) Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran Rp. 56.737.200. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 8) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 9.050.800. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 9) Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 11.289.200. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 10) Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 200.522.900. Pada tahun 2021 sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai target kinerja

100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 99,61% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.

- 11) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 104.383.500. Pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 98,43% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
4. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah mempunyai 1 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD perubahan Rp. 0 sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai 1 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 1.422.181.000. Pada tahun 2021 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja program tersebut pada tahun 2021 mencapai 93,53% yang artinya target daripada program tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai 13 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 1.422.181.000. Pada tahun 2021 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 93,53% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan alokasi anggaran Rp. 340.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyusunan Standar Harga mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 91,97% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 35.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 90,84% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
 - 3) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp. 20.000.000 sedangkan pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0 sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
 - 4) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 35.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 91,85% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.

- 5) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 90.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 94,42% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
- 6) Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 96,85% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
- 7) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 376.681.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 97,11% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
- 8) Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 95.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 89,82% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
- 9) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 143.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 98,80% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
- 10) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 125.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 85,54% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
- 11) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 65.000.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 81,81% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.
- 12) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran pada APBD Murni sebesar Rp. 20.000.000 sedangkan pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0 sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

13) Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 97.500.000. Pada tahun 2021 sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai target kinerja 100% dan realisasi kinerja sub kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 99,18% yang artinya target daripada kegiatan tersebut sudah terrealisasi dengan baik.

- c. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Merujuk pada Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2021, pada tahun 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak terdapat realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang melebihi target kinerja.

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan hasil laporan realisasi capaian kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada tahun 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang telah memenuhi target capaian kinerja sebesar 78,68% dari target yang direncanakan 96,50% yang artinya target tersebut sudah terrealisasi dengan baik, meskipun belum memenuhi target yang telah direncanakan sebelumnya.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Terhadap implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat daerah, yaitu tercapainya target Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 Opini BPK terhadap laporan keuangan (WTP) dan penetapan APBD tepat waktu untuk penetapan APBD Tahun Anggaran 2022.

- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berkenaan dengan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil yaitu menyempurnakan beberapa regulasi yang selama ini belum disusun, diantaranya penyusunan regulasi yang mengatur terkait pengelolaan keuangan daerah.

Target kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 realisasi tahun 2021 adalah WTP maka capaian kinerja sebesar 100%. Dalam pencapaiannya WTP tidak serta merta dengan mudah, akan tetapi banyak permasalahan yang dihadapi dalam menyusun LKPD berbasis akrual adalah sistem informasi, keterbatasan SDM komitmen stakeholder, kompleksitas transaksi, audit oleh BPK RI, keterbatasan waktu. Solusi dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut adalah dengan cara :

- a) Regulasi dan kelembagaan

- Menyempurnakan peraturan yang ada
- Menyempurnakan SOP
- Membuat daftar masalah dan solusinya (MR)
- Memastikan semua transaksi ada dasar hukumnya

- b) Sumber daya manusia

- Peningkatan komitmen jajaran pimpinan daerah dan stakholder lainnya dalam mendukung pelaporan keuangan yang berbasis akrual

- Penguatan nilai organisasi dengan fakta intergitas
 - Sosialisasi dan pelatihan akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah
 - Melakukan bimbingan langsung dalam penyelesaian masalah helpdesk
- c) Teknologi informasi
- Menyediakan sarana dan prasarana teknologi pendukung informasi
 - Kordinasi dengan pembuat aplikasi SIPKD dan SIMDA
- d) Sistem pengendalian internal
- Peningkatan peran inspektorat daerah dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui review LK
 - Menyempurnakan sistem pengendalian internal dari tahap penganggaran hingga pertanggung jawaban
 - Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan auditor internal maupun external
- e) Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
- Membuat time prime serta target penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
 - Melakukan monitoring secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan LKPD
 - Melakukan kordinasi dan komunikasi dengan auditor untuk memastikan tindak lanjut sudah sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan
- f) Sinergi antar stakeholder

Sinergi yang bagus antara pemerintah daerah pemerintah pusat, APIP, pemeriksa laporan keuangan dan dewan

Target kinerja Penetapan APBD Tepat waktu tahun 2021 untuk APBD tahun anggaran 2022 adalah Tepat waktu. Dalam pencapaiannya terdapat beberapa faktor keberhasilan, yaitu :

- Ketaatan dalam mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku dalam penyusunan APBD;
- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari seluruh SKPD dalam proses penyusunan APBD;
- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara eksekutif (dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan DPRD;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi.

Sedangkan kendala dalam capaian kinerja Penetapan APBD tepat Waktu adalah adanya peraturan-peraturan/ketentuan pemerintah pusat yang ditetapkan pada saat tahun anggaran berjalan, sehingga diperlukan penyesuaian APBD. Khususnya pada tahun 2021 sebagai dampak dari masih berlangsungnya pandemic covid-19, yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan pusat dan berdampak kepada anggaran pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Kabupaten Sumedang

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
SEBELUM PERUBAHAN										
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah								
	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00			
	Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00			
	Sinegritas Perencanaan Penyusunan Anggaran	Jumlah Tim Verifikator	20 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100.00			
	Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00			
	Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280 SKPD	56 SKPD	56 SKPD	56 SKPD	100.00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00			
	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Murni	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00			
	Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280 SKPD	56 SKPD	56 SKPD	56 SKPD	100.00			
	Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00			
	Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280 SKPD	56 SKPD	56 SKPD	56 SKPD	100.00			
	Asistensi DPPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280 SKPD	56 SKPD	56 SKPD	56 SKPD	100.00			
	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah	15 Sistem	3 Sistem	3 Sistem	3 Sistem	100.00			
	Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	Buku Saku Murni dan Perubahan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00			
	Sinegritas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi	280 SKPD	56 SKPD	56 SKPD	56 SKPD	100.00			
	Peningkatan Kapasitas TAPD	Jumlah TAPD	20	-	-	-	-			
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00			
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	20 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00			
	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	280 SKPD	56 SKPD	56 SKPD	56 SKPD	100.00			
	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00			
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	56 SKPD	-	56 SKPD	56 SKPD	100.00			
	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	224 SKPD	-	-	-	-			
	Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengesahan	3360 Dokumen	-	-	-	-			
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00			
	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00			
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00			
	Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi berbasis Akrua	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00			
	Sinegritas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	280 SKPD	56 SKPD	56 SKPD	56 SKPD	100.00			
	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	Jumlah Dokumen LRA	120 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00			
	Penyusunan RKBMD dan RKPBM	Jumlah SKPD yang dikelola	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00			
	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	280 Dokumen	56 Dokumen	56 Dokumen	56 Dokumen	100.00						
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	280 Orang	56 Orang	56 Orang	56 Orang	100.00						
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00						
	Identifikasi Belanja Modal SKPD	Jumlah Dokumen Identifikasi BMD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00						
	Pengelolaan Sistem Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00						
	Inventarisasi Aset	Jumlah Dokumen rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset	4 Dokumen	-	-	-	-						
	Penyusunan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu	4 Dokumen	-	-	-	-						
SETELAH PERUBAHAN													
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	6	2	2	1	2	6	100.00
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	6	2	2	1	2	6	100.00
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Validasi RKA SKPD	3	1	1	1	1	3	100.00
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Validasi Perubahan RKA SKPD	3	1	1	1	1	3	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Validasi DPA SKPD	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Validasi Perubahan DPA SKPD	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD	6	2	2	2	1	2	6	100.00
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	18	6	6	6	1	6	18	100.00
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan	12	4	4	4	1	4	12	100.00
5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pendapatan	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Belanja Daerah	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah								
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6	2	2	2	1	2	6	100.00
5 02 02 2.02 03	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Validasi RAK Murni dan Perubahan, Jumlah prakiraan pengeluaran kas daerah dan jumlah penerbitan SPD	6	2	2	2	1	2	6	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi Laporan Konfirmasi Transfer /rekonsiliasi dana spesifik dan penyaluran dana spesifik (DAU)	9	3	3	3	1	3	9	100.00
5 02 02 2.02 06	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah koordinasi pelaksanaan transaksi non tunai	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6	2	2	2	1	2	6	100.00
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Buku Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan Penatausahaan	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Register Penerimaan dan Register Pengeluaran	6	2	2	2	1	2	6	100.00
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	9	3	3	3	1	3	9	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan LRA Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Unaudited dan Audited	12	4	4	4	1	4	12	100.00
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda LPP APBD dan Perbub LPP APBD	12	4	4	4	1	4	12	100.00
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Tindak lanjut BPK	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Tim Majelis TGR	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Analisa Laporan Keuangan Pemda	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi dan Buku Perbup Bagan Akun Standar	6	2	2	2	1	2	6	100.00
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup Sisdur Akuntansi	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan Akuntansi	3	1	1	1	1	1	3	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan BLUD	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 02 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	6	2	2	2	1	2	6	100.00
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Penyaluran Bantuan Keuangan	6	2	2	2	1	2	6	100.00
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen Dana Darurat dan Mendesak	6	2	2	2	1	2	6	100.00
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Dana Bagi hasil	12	4	4	4	1	4	12	100.00
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data lingkup keuangan daerah								
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Jumlah Coustum dalam Sistem	3							
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)								
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah								
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah SSH	3	1	1	1	1	1	3	100.00
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Jumlah Standar Barang Kebutuhan Barang Milik Daerah	6	2	2	2	1	2	6	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023										
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)									
1					2					3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPBM	6	2	2	2	2	1	2	6	100.00				
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	4	4	4	4	1	4	12	100.00				
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	4	4	4	4	1	4	12	100.00				
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi barang Milik daerah	Jumlah Inventarisasi BMD	6	2	2	2	2	1	2	6	100.00				
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah BMD yang diamankan	3	1	1	1	1	1	1	3	100.00				
5	02	03	2.01	08	penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BA Penilaian BMD	6	2	2	2	2	1	2	6	100.00				
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BA Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan BMD	6	2	2	2	2	1	2	6	100.00				
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah	Jumlah optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan	9	3	3	3	3	1	3	9	100.00				
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	3	1	1	1	1	1	1	3	100.00				
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang milik daerah	Jumlah Penetapan Status pengguna barang	3	1	1	1	1	1	1	3	100.00				
5	02	03	2.01	13	pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan BMD	3	1	1	1	1	1	1	3	100.00				

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang

Ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc

Pembina TK.I/ IV.b

NIP. 19690315 199901 2 001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. BKAD harus menjadi koordinator bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sehingga tercipta tata kelola keuangan dan aset yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang diinginkan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, maka perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi BKAD, agar kualitas pelayanan semakin baik. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Capaian					Realisasi Capaian					Proyeksi
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP
2	Penetapan APBD			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu
3	Nilai Sakip			B	BB	BB	BB	A	B	BB	BB	A	-	A
4	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah			96.15	96.25	96.50	97	97.10	93.73	91.17	78.68	-	-	97
5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1
6	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi			65	70	75	80	85	68.88	57.16	82.43	89.60	-	80

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan;
 5. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2021 pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang ditelaah dari Capaian Indikator Kinerja Utama seperti Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan pada tahun 2021 mempunyai target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan dalam realisasinya pun Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang telah mencapai WTP pada tahun 2021. Untuk capaian Indikator Kinerja Utama Penetapan APBD dari yang ditargetkan "Tepat Waktu" telah terrealisasi pada tahun 2021.

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BKAD Kabupaten Sumedang terus berupaya untuk meningkatkan capaian kerjanya dalam upaya memenuhi target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 dimana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah selama Tahun 2021 masih mengalami beberapa kendala sebagai berikut :

1. Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset bersifat dinamis;
2. Adanya pergantian petugas pengelola keuangan dan aset pada SKPD mengakibatkan hasil pekerjaan kurang optimal;
3. Struktur APBD belum ideal;
4. Implementasi Akuntansi berbasis Akrual belum optimal;
5. Penatausahaan aset daerah belum optimal

- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals) bahwa visi dan misi kepala daerah dapat mendukung program nasional sebagaimana dimaksud diatas, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan dukungan dari kabupaten/kota.

- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*Strengths*)

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;

Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai dan nyaman sangat menunjang kelancaran pekerjaan.

3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;
Dengan jumlah kekuatan personil sebanyak 60 orang telah dirasakan cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah.
4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;
Kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai merupakan modal dasar yang potensial dalam menjalankan tupoksi organisasi guna mencapai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama seluruh stakeholder.
5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi BKAD.
Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur sebagai panduan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kelemahan (*weakness*)

1. Kualitas SDM masih belum memadai;
Meskipun dari segi jumlah sudah memadai, namun untuk kompetensi masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga mempunyai SDM yang kompeten dan profesional.
2. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah;
Fungsi pengelolaan aset daerah dirasakan masih perlu diperkuat dengan pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Sistem Aplikasi SIPD dan SIPASTI masih belum terintegrasi sehingga pengelolaan keuangann dan aset daerah membutuhkan waktu yang cukup lama.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang penting, sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang memadai. Diantara peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini BPK terhadap laporan keuangan yaitu WTP. Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan peran serta bersama seluruh SKPD.

1. Penggunaan teknologi informasi yang memadai.

Sistem informasi dibutuhkan dalam manajemen perkantoran untuk menjalankan aktivitas, seperti mengolah data transaksi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi informasi yang berguna. Diantara teknologi informasi yang dipakai berupa aplikasi yaitu SIPD dan SIPASTI.

b. Ancaman (Threats)

1. Koordinasi antar dinas belum memadai.

Masih terdapat kendala dalam proses koordinasi dengan dinas, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu penyampaian dokumen keuangan. Diantara dokumen keuangan dimaksud yaitu SPP/SPM, laporan rekonsiliasi, laporan pertanggungjawaban, dll.

2. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kekhawatiran ini harus dilindungi dengan payung hukum yang mengatur setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah.

Kondisi tersebut dapat berdampak buruk, karena bisa menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.

4. Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersifat dinamis.

Hal ini menjadi kendala ketika APBD sudah ditetapkan, tetapi kemudian harus mengalami perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD karena adanya regulasi yang bersifat dinamis.

- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN
I N T E R N A L	K E K U A T A N	Strategi Kd I : <i>Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</i>	Strategi Kd II : Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
	K E L E M A H A N	Strategi Kd III : Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	Strategi Kd IV : Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/

2. Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan;
3. Peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Penguatan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. Perlu adanya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;

Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program- program pelatihan dan sertifikasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan;

Target kinerja dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk perencanaan yang baik. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Dokumen Rencana Kerja BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2023, pada Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPd Tahun 2023
Kabupaten Sumedang

SKPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir RKPd						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
A	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Sumedang	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	95%	1,059,569,800	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Sumedang	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	95%	1,650,000,000	
			Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100%	1,943,430,200			Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100%	2,900,000,000	
			Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	95%	1,782,000,000			Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	95%	2,700,000,000	
			Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	95%	1,973,400,000			Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	95%	2,990,000,000	
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Sumedang	Dokumen pengendalian Anggaran	12 Dokumen	1,059,569,800	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Sumedang	Dokumen pengendalian Anggaran	12 Dokumen	1,650,000,000	
			Dokumen Perencanaan Penganggaran	11 Dokumen	1,943,430,200			Dokumen Perencanaan Penganggaran	11 Dokumen	2,900,000,000	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	263,283,550	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	325,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	203,175,900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	325,000,000	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	226,121,850	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	275,000,000	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	170,644,450	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	300,000,000	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	212,634,850	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	275,000,000	

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	179,029,050	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	300,000,000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Sumedang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	241,699,300	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Sumedang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	400,000,000	
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Sumedang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	351,411,050	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Sumedang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	600,000,000	
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	500,000,000	
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	155,000,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	250,000,000	
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	300,000,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	500,000,000	
12	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaPenganggaran Daerah PemerintKabupaten/Kota	1 Dokumen	300,000,000	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaPenganggaran Daerah PemerintKabupaten/Kota	1 Dokumen	500,000,000	
II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	12 Dokumen	1,782,000,000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	12 Dokumen	2,700,000,000	
13	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	450,000,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	500,000,000	

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
14	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	82,000,000	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	350,000,000	
15	Koordinasi, Fasilitas. Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen	350,000,000	Koordinasi, Fasilitas. Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen	350,000,000	
16	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	300,000,000	
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Dokumen	500,000,000	

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
18	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Sumedang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Sumedang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	300,000,000	
19	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400,000,000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400,000,000	
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1,146,700,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2,240,000,000	
			Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	11 Dokumen	826,700,000			Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	11 Dokumen	750,000,000	
20	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	132,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	200,000,000	
21	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	181,500,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	275,000,000	
22	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	211,200,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	320,000,000	
23	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	262,000,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	375,000,000	

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
24	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	221,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	275,000,000	
25	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	30,000,000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	100,000,000	
26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	30,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	175,000,000	
27	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	115,500,000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	175,000,000	
28	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	392,700,000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	595,000,000	
29	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	150,000,000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	225,000,000	
30	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Laporan	247,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Laporan	275,000,000	

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
IV	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9 Dokumen	423,228,021,000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9 Dokumen	608,110,000,000	
31	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	810,000,000	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	810,000,000	
32	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	368,130,726,000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	469,656,090,187	
33	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	24,800,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	101,794,934,046	
34	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	29,487,295,000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	35,848,975,767	
B	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Sumedang	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89%	3,141,600,000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Sumedang	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89%	2,039,445,000	
V	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	3,141,600,000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	2,039,445,000	
35	Penyusunan Standar Harga	Kab. Sumedang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	299,510,000	Penyusunan Standar Harga	Kab. Sumedang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	423,500,000	
36	Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0	Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	60,500,000	
37	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	41,710,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	33,000,000	
38	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	0	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	84,700,000	
39	Penatausahaan Barang Milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	111,804,000	Penatausahaan Barang Milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	169,400,000	
40	Inventarisasi barang Milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	95,832,000	Inventarisasi barang Milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	60,500,000	
41	Pengamanan Barang Milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2,108,538,300	Pengamanan Barang Milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	450,000,000	

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
42	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	123,783,000	penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	187,550,000	
43	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	63,488,700	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	96,195,000	
44	Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Daerah Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	3 Dokumen	155,270,000	Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Daerah Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	3 Dokumen	159,500,000	
45	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	79,860,000	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	121,000,000	
46	Penyusunan Laporan Barang milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	0	Penyusunan Laporan Barang milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	24,200,000	
47	pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah kabupaten/kota	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	61,804,000	pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah kabupaten/kota	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	169,400,000	

- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
Untuk menjadi acuan atau rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun anggaran 2023, dimana proses tersebut meliputi kegiatan yang ada pada tabel diatas.
- c. Antara rancangan awal RKPD dengan rancangan akhir tidak terdapat catatan penting ataupun rumusan program dan kegiatan yang baru, akan tetapi terdapat beberapa besaran anggaran yang berbeda, hal tersebut disebabkan hasil penyesuaian kebutuhan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan di BKAD.

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Agar terjadi sinergitas dalam penyusunan perencanaan kegiatan, maka dalam proses perencanaan selain berdasarkan usulan dan kebutuhan SKPD, juga harus memperhatikan usulan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, maka proses penyusunan dokumen perencanaan dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan musrenbang tingkat Kabupaten, sehingga diharapkan dalam aplikasi proses pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan yang ditetapkan tadi sesuai dan sinergis dengan aspirasi masyarakat.

Namun demikian semua usulan kegiatan BKAD Tahun 2023, tidak ada satu pun usulan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat, sehingga semua usulan program/kegiatan berdasarkan usulan SKPD yang mengacu pada Renstra SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

TABEL 2.4
 USULAN PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN AKTIVITAS SUB KEGIATAN TAHUN 2023
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)			Keterangan	Aktivitas	
				Tahun 2023	Tahun 2024	APBD (PI PD)	APBD PROV	APBN (DAK)			
				5	6	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	
05	KEUANGAN	Kab. Sumedang				742,508,772,875					
05	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sumedang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	360,000,000			
			Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan			100%	100%	302,690,751,875			
			Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan			100%	100%	305,000,000			
			Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai			100%	100%	386,250,000			
			Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai			100%	100%	1,535,000,000			

							Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100%	100%	1,416,000,000									
							Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100%	100%	1,812,750,000									
							Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100%	100%	875,000,000									
05	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	360,000,000								
05	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	150,000,000								
05	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000								
05	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000								
05	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	150,000,000								
05	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	302,690,751,875								
05	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	302,590,751,875								
05	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000								

Kode						Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)			Keterangan	Aktivitas
									Tahun 2023	Tahun 2024	APBD (PI PD)	APBD PROV	APBN (DAK)		
1						2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
05	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	90,000,000				
05	02	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	305,000,000				
05	02	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	305,000,000				
05	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	386,250,000				
05	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumedang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92 Stel	92 Stel	150,000,000				
05	02	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000				
05	02	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	186,250,000				
05	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	68 Laporan	68 Laporan	1,535,000,000				
05	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumedang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	300,000,000				
05	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sumedang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000				
05	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumedang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	245,000,000				
05	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumedang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	190,000,000				

Kode						Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)			Keterangan	Aktivitas
									Tahun 2023	Tahun 2024	APBD (PI PD)	APBD PROV	APBN (DAK)		
1						2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
05	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	35,000,000				
05	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	600,000,000				
05	02	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	40,000,000				
05	02	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	75,000,000				
05	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1,416,000,000				
05	02	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sumedang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1,150,000,000				
05	02	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumedang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	303 Unit	303 Unit	0				
05	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Sumedang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	90 Unit	102,000,000				
05	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumedang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	164,000,000				
05	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	24 Laporan	1,812,750,000				
05	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	243,000,000				
05	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,569,750,000				

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)			Keterangan	Aktivitas
				Tahun 2023	Tahun 2024	APBD (PI PD)	APBD PROV	APBN (DAK)		
				5	6					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
05 02 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	875,000,000				
05 02 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumedang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Laporan	12 Laporan	250,000,000				
05 02 01 2 09 03	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumedang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000				
05 02 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumedang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan	12 Laporan	95,000,000				
05 02 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumedang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Laporan	1 Laporan	370,000,000				
05 02 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sumedang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000				
05 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Sumedang	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	97%	97%	1,059,569,800				
			Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100%	100%	1,943,430,200				
			Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	97%	97%	425,010,021,000				
			Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	97%	97%	1,973,400,000				
05 02 02 2 01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Sumedang	Dokumen pengendalian Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	1,059,569,800				
			Dokumen Perencanaan Penganggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	1,943,430,200				
05 02 02 2 01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	263,283,550			Pagu Urusan	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)			Keterangan	Aktivitas
				Tahun 2023	Tahun 2024	APBD (PI PD)	APBD PROV	APBN (DAK)		
				5	6					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
05 02 02 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	203,175,900			Pagu Urusan	
05 02 02 2 01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	226,121,850			Pagu Urusan	
05 02 02 2 01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	170,644,450			Pagu Urusan	
05 02 02 2 01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	212,634,850			Pagu Urusan	
05 02 02 2 01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sumedang	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	179,029,050			Pagu Urusan	
05 02 02 2 01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Sumedang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	241,699,300			Pagu Urusan	
05 02 02 2 01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Sumedang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	6 Dokumen	351,411,050			Pagu Urusan	
05 02 02 2 01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	400,000,000			Pagu Urusan	
05 02 02 2 01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen	155,000,000			Pagu Urusan	
05 02 02 2 01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000			Pagu Urusan	
05 02 02 2 01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000			Pagu Urusan	
05 02 02 2 02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	1,782,000,000				

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)			Keterangan	Aktivitas
				Tahun 2023	Tahun 2024	APBD (PI PD)	APBD PROV	APBN (DAK)		
				5	6					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
05 02 02 2 02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	450,000,000			Pagu Urusan	
05 02 02 2 02 03	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen	82,000,000			Pagu Urusan	
05 02 02 2 02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen	3 Dokumen	350,000,000			Pagu Urusan	
05 02 02 2 02 06	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000			Pagu Urusan	
05 02 02 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Dokumen	2 Dokumen	400,000,000			Pagu Urusan	

Kode						Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)			Keterangan	Aktivitas
									Tahun 2023	Tahun 2024	APBD (PI PD)	APBD PROV	APBN (DAK)		
1						2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
05	02	02	2	02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Sumedang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000			Pagu Urusan	
05	02	02	2	02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000			Pagu Urusan	
05	02	02	2	03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1,146,700,000				
								Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	826,700,000				
05	02	02	2	03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	2 Laporan	132,000,000			Pagu Urusan	
05	02	02	2	03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	3 Dokumen	181,500,000			Pagu Urusan	
05	02	02	2	03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	211,200,000			Pagu Urusan	
05	02	02	2	03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Dokumen	4 Dokumen	262,000,000			Pagu Urusan	

Kode						Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)			Keterangan	Aktivitas
									Tahun 2023	Tahun 2024	APBD (PI PD)	APBD PROV	APBN (DAK)		
1						2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
05	02	02	2	03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	221,500,000			Pagu Urusan	
05	02	02	2	03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000			Pagu Urusan	
05	02	02	2	03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000			Pagu Urusan	
05	02	02	2	03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	115,500,000			Pagu Urusan	
05	02	02	2	03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	392,700,000			Pagu Urusan	
05	02	02	2	03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000			Pagu Urusan	
05	02	02	2	03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	247,000,000			Pagu Urusan	
05	02	02	2	04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	423,228,021,000				

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)			Keterangan	Aktivitas
				Tahun 2023	Tahun 2024	APBD (PI PD)	APBD PROV	APBN (DAK)		
				5	6					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
05 02 02 2 04 07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Kab. Sumedang	Jumlah dokumen kebijakan dan alokasi subsidi	1 Dokumen	1 Dokumen	810,000,000			Fixed cost	Dialokasikan untuk KURDA (Kredit Usaha Rakyat Daerah)
05 02 02 2 04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	368,130,726,000			Fixed cost	-Untuk mendukung program unggulan kepala daerah -Untuk dialokasikan ke setiap desa yang ada di Kabupaten Sumedang untuk memenuhi kebutuhan Siltap Kades dan Perangkat Desa, tunjangan Kades dan Perangkat Desa, Insentif BPD, BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa, Insentif RT/RW dan Insentif Kader
05 02 02 2 04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Dokumen	2 Dokumen	24,800,000,000			Fixed cost	- Untuk antisipasi kejadian tidak terduga di Kabupaten Sumedang - Dana penunjang bantuan keuangan provinsi
05 02 02 2 04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	29,487,295,000			Fixed cost	Untuk dialokasikan ke setiap desa yang ada di Kabupaten Sumedang untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbiayai dari ADD
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Sumedang	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91%	91%	3,141,600,000				
5 02 03 2 01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	26 Dokumen	26 Dokumen	3,141,600,000				
5 02 03 2 01 01	Penyusunan Standar Harga	Kab. Sumedang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	299,510,000			Pagu Urusan	
5 02 03 2 01 02	Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0			Pagu Urusan	
5 02 03 2 01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	41,710,000			Pagu Urusan	
5 02 03 2 01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	0			Pagu Urusan	
5 02 03 2 01 05	Penatausahaan Barang Milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	111,804,000			Pagu Urusan	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)			Keterangan	Aktivitas
				Tahun 2023	Tahun 2024	APBD (PI PD)	APBD PROV	APBN (DAK)		
				5	6					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
5 02 03 2 01 06	Inventarisasi barang Milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	95,832,000			Pagu Urusan	
5 02 03 2 01 07	Pengamanan Barang Milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2,108,538,300			Pagu Urusan dan Fixed cost	Sertifikasi Barang Milik Daerah ± 1500 Sertifikat (1,800,000,000)
5 02 03 2 01 08	penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	123,783,000			Pagu Urusan	
5 02 03 2 01 09	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	63,488,700			Pagu Urusan	
5 02 03 2 01 10	Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Daerah Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	3 Dokumen	3 Dokumen	155,270,000			Pagu Urusan	
5 02 03 2 01 11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	79,860,000			Pagu Urusan	
5 02 03 2 01 12	Penyusunan Laporan Barang milik daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0			Pagu Urusan	
5 02 03 2 01 13	pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah kabupaten/kota	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	61,804,000			Pagu Urusan	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 memiliki Tujuan "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan". Apabila ditelaah, Misi tersebut sesuai dengan sembilan program Nawa cita khususnya point ke 2 yaitu "Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan".

Selain itu, terdapat juga keterkaitan dengan Misi Provinsi Jawa Barat 2019-2023 khususnya Misi ke-5, yaitu "Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, dengan Sasaran Misi yaitu Birokrasi Juara, APBD Juara, ASN Juara dan BUMD Juara."

Dari hasil telaahan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan adanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset yang ditopang dengan sumber daya manusia yang profesional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKAD

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, maka perlu dijabarkan kembali menjadi sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Tujuan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*).

Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan diantaranya bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan harus dapat mendukung demi tercapainya indikator kinerja utama BKAD yaitu opini BPK terhadap laporan keuangan dan penetapan APBD tepat waktu.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan

Gambaran secara garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah 3 Program, 13 Kegiatan dan 77 Sub Kegiatan. Berdasarkan RKPD Tahun 2023 rincian daftar program, kegiatan dan sub kegiatan bisa dilihat sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

- 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - 10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - 11) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - 12) Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - 4) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 - 7) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota
 - 6) Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 7) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - 8) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 9) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota
 - 10) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota
 - 11) Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1) Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
 - 2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 3) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - 4) Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
- C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1) Penyusunan Standar Harga
 - 2) Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 3) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 4) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 6) Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - 7) Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 8) Penilaian Barang Milik Daerah
 - 9) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 10) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - 11) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - 12) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

13) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

Berkenaan dengan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, akan tetapi terdapat beberapa besaran anggaran yang berbeda, hal tersebut disebabkan hasil penyesuaian kebutuhan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan di BKAD.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, Visi Kabupaten Sumedang adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023*** dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

SEJAHTERA Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

AGAMIS Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai- nilai agama yang dinyakininya. Ditandai banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MAJU Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antar pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

PROFESIONAL *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.

KREATIF masyarakat yang memiliki dorongan kerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat- pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian trickle-down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu perlu disertai dengan kesiapan tenaga- tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream diamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4

yaitu **“Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat”** diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan **Tujuan** yang merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sebagai berikut:

” Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”

Tujuan BKAD mengandung makna yang sangat jelas yaitu bahwa harus dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan. Akuntabilitas kinerja dan keuangan harus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian misi ke 4 yaitu menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

- d. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.1 / T-C.33

Sesuai dengan usulan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.1 / T-C.33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	02	KEUANGAN																
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	10 Dokumen	24 Dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	100,000,000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	2 Dokumen	24 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	30,000,000
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	2 Dokumen	24 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	30,000,000
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	10 Dokumen	24 Dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	150,000,000
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	12 Dokumen	24 Dokumen	302,590,751,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	182,686,422,332
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	12 Dokumen	24 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	10,000,000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	12 Dokumen	24 Dokumen	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	90,000,000
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								305,000,000					300,000,000
5 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 Persen	3 Dokumen	1 Dokumen	305,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	300,000,000
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								386,250,000					475,000,000
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	92 Stel	12 Laporan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	150,000,000
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	50,000,000
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	60 orang	12 Laporan	186,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	275,000,000
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,535,000,000					1,590,000,000
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	2 Laporan	68 Laporan	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	300,000,000
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1 Laporan	68 Laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	50,000,000
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Laporan	68 Laporan	245,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	230,000,000
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Laporan	68 Laporan	190,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	150,000,000
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Laporan	68 Laporan	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	35,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Laporan	68 Laporan	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	600,000,000
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Laporan	68 Laporan	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	25,000,000
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Laporan	68 Laporan	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	200,000,000
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,416,000,000					1,490,000,000
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	2 Unit	2 Laporan	1,150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	1,150,000,000
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	0 Unit	2 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	0
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	90 Unit	2 Laporan	102,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	250,000,000
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	3 Unit	2 Laporan	164,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	90,000,000
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,812,750,000					1,685,000,000
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	12 Laporan	24 Laporan	243,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	225,000,000
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	12 Laporan	24 Laporan	1,569,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	1,460,000,000
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								875,000,000					860,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	12 Laporan	4 laporan	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	205,000,000
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1 Laporan	4 laporan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	10,000,000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	12 Laporan	4 laporan	95,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	80,000,000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1 Laporan	4 laporan	370,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	415,000,000
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1 Laporan	4 laporan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	150,000,000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							429,986,421,000						187,882,295,000
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							3,003,000,000						4,550,000,000
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen pengendalian Anggaran dan Dokumen Perencanaan Penganggaran Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen 100 Persen 97 Persen	2 Dokumen	23 Dokumen 24 Dokumen	263,283,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 100 Persen 97 Persen	325,000,000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen pengendalian Anggaran dan Dokumen Perencanaan Penganggaran Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen 100 Persen 97 Persen	2 Dokumen	23 Dokumen 24 Dokumen	203,175,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 100 Persen 97 Persen	325,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen pengendalian Anggaran dan Dokumen Perencanaan Penganggaran Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen 100 Persen 97 Persen	1 Dokumen	23 Dokumen 24 Dokumen	226,121,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 100 Persen 97 Persen	275,000,000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen pengendalian Anggaran dan Dokumen Perencanaan Penganggaran Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen 100 Persen 97 Persen	1 Dokumen	23 Dokumen 24 Dokumen	170,644,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 100 Persen 97 Persen	300,000,000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen pengendalian Anggaran dan Dokumen Perencanaan Penganggaran Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen 100 Persen 97 Persen	1 Dokumen	23 Dokumen 24 Dokumen	212,634,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 100 Persen 97 Persen	275,000,000
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen pengendalian Anggaran dan Dokumen Perencanaan Penganggaran Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen 100 Persen 97 Persen	1 Dokumen	23 Dokumen 24 Dokumen	179,029,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 100 Persen 97 Persen	300,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen pengendalian Anggaran dan Dokumen Perencanaan Penganggaran Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen 100 Persen 97 Persen	2 Dokumen	23 Dokumen 24 Dokumen	241,699,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 100 Persen 97 Persen	400,000,000
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen pengendalian Anggaran dan Dokumen Perencanaan Penganggaran Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen 100 Persen 97 Persen	6 Dokumen	23 Dokumen 24 Dokumen	351,411,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 100 Persen 97 Persen	600,000,000
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen pengendalian Anggaran dan Dokumen Perencanaan Penganggaran Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen 100 Persen 97 Persen	4 Dokumen	23 Dokumen 24 Dokumen	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 100 Persen 97 Persen	500,000,000
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen pengendalian Anggaran dan Dokumen Perencanaan Penganggaran Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen 100 Persen 97 Persen	1 Dokumen	23 Dokumen 24 Dokumen	155,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 100 Persen 97 Persen	250,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen pengendalian Anggaran dan Dokumen Perencanaan Penganggaran Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen 100 Persen 97 Persen	1 Dokumen	23 Dokumen 24 Dokumen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 100 Persen 97 Persen	500,000,000
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen pengendalian Anggaran dan Dokumen Perencanaan Penganggaran Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen 100 Persen 97 Persen	1 Dokumen	23 Dokumen 24 Dokumen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 100 Persen 97 Persen	500,000,000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							1,782,000,000						2,700,000,000
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah		97 Persen	2 Dokumen	12 Dokumen	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	97 Persen	500,000,000
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah		97 Persen	2 Dokumen	12 Dokumen	82,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	97 Persen	350,000,000
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah		97 Persen	3 Dokumen	12 Dokumen	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	97 Persen	350,000,000
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah		97 Persen	1 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	97 Persen	300,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah		97 Persen	2 Dokumen	12 Dokumen	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	97 Persen	500,000,000
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah		97 Persen	1 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	97 Persen	300,000,000
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah		97 Persen	1 Dokumen	12 Dokumen	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	97 Persen	400,000,000
5	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								1,973,400,000					2,845,000,000	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran dan Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		97 Persen	2 Laporan	6 Dokumen	132,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	97 Persen	200,000,000
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran dan Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		97 Persen	3 Dokumen	6 Dokumen	181,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	97 Persen	275,000,000
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran dan Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		97 Persen	1 Laporan	6 Dokumen	211,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	97 Persen	320,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran dan Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		97 Persen	4 Laporan	6 Dokumen	262,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	97 Persen	375,000,000
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran dan Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		97 Persen	4 Dokumen	6 Dokumen	221,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	97 Persen	275,000,000
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran dan Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		97 Persen	1 Dokumen	6 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	97 Persen	100,000,000
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran dan Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		97 Persen	1 Dokumen	6 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	97 Persen	175,000,000
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran dan Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		97 Persen	1 Dokumen	6 Dokumen	115,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	97 Persen	175,000,000
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran dan Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		97 Persen	1 Dokumen	6 Dokumen	392,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	97 Persen	275,000,000
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran dan Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		97 Persen	1 Dokumen	6 Dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	97 Persen	275,000,000
5 02 02 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran dan Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		97 Persen	2 Laporan	6 Dokumen	247,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	97 Persen	400,000,000
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								423,228,021,000					177,787,295,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	02 02 2.04 07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		97 Persen	1 Laporan	12 Dokumen	810,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	97 Persen	500,000,000
5	02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		97 Persen	2 Laporan	12 Dokumen	368,130,726,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	97 Persen	127,800,000,000
5	02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		97 Persen	2 Laporan	12 Dokumen	24,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	97 Persen	20,000,000,000
5	02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		97 Persen	4 Laporan	12 Dokumen	29,487,295,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	97 Persen	29,487,295,000
5	02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								3,141,600,000					1,695,445,000
5	02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah								3,141,600,000					1,695,445,000
5	02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		91 Persen	1 Dokumen	26 Dokumen	299,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 Persen	33,000,000
5	02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		91 Persen	2 Dokumen	26 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 Persen	84,700,000
5	02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		91 Persen	2 Dokumen	26 Dokumen	41,710,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 Persen	169,400,000
5	02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		91 Persen	4 Dokumen	26 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 Persen	60,500,000
5	02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		91 Persen	4 Laporan	26 Dokumen	111,804,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 Persen	450,000,000
5	02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		91 Persen	2 Laporan	26 Dokumen	95,832,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 Persen	187,550,000
5	02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		91 Persen	2 Laporan	26 Dokumen	2,108,538,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 Persen	96,195,000
5	02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		91 Persen	2 Laporan	26 Dokumen	123,783,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 Persen	159,500,000
5	02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		91 Persen	1 Laporan	26 Dokumen	63,488,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 Persen	121,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Daerah Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		91 Persen	3 Dokumen	26 Dokumen	155,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 Persen	24,200,000
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		91 Persen	1 Laporan	26 Dokumen	79,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 Persen	169,400,000
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		91 Persen	1 Laporan	26 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 Persen	20,000,000
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		91 Persen	1 Dokumen	26 Dokumen	61,804,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 Persen	120,000,000
TOTAL									742,508,772,875					379,074,162,332

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

4.1. Rencana Program Badan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset sebagai berikut:

A. Belanja Program pada setiap SKPD:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dari program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

B. Belanja Urusan SKPD:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.2. Rencana Kegiatan Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Dari ketiga program di atas telah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, selanjutnya dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RPKD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
05001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	310,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000	-	APBD Kab
		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	130,100,000,000	182,786,422,332	182,786,422,332	182,786,422,332	-	
		Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	300,000,000	305,000,000	305,000,000	305,000,000	-	
		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100%	475,000,000	356,250,000	356,250,000	356,250,000	-	
		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100%	1,520,000,000	1,589,000,000	1,589,000,000	1,589,000,000	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RKP	PAGU RANCANGAN RENJA/ RKP	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RKP	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100%	10,940,000,000	8,967,000,000	8,967,000,000	8,967,000,000	-	
		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100%	1,685,000,000	1,812,750,000	1,812,750,000	1,812,750,000	-	
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100%	1,520,000,000	875,000,000	875,000,000	875,000,000	-	
052010	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	310,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000	-	
052010	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	100,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	APBD Kab
		Delegasi Forum Musrenbang Kabupaten, Forum SKPD, Penyusunan KAK, Penyusunan KAK Perubahan, Penyusunan Renja Perubahan SKPD, Penyusunan Renja SKPD, Pra Forum, Ranwal Renja, Reviu Renstra SKPD, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Profil							

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RPKD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
0521200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	APBD Kab
	Penyusunan RKA, Penyusunan RKA P-APBD								
0521400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	APBD Kab
	Penyusunan DPA, Penyusunan DPPA								
0521600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	APBD Kab
	Penyusunan Laporan Ikhtisar, Manajemen Risiko, Laporan Realisasi, SAKIP, RB dan ZI, LKIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPIP			-	-	-	-	-	APBD Kab
0522200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24 Dokumen	130,100,000,000	182,786,422,332	302,690,751,875	302,690,751,875	119,894,329,543	APBD Kab
0522100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	130,000,000,000	182,686,422,332	302,590,751,875	302,590,751,875	119,904,329,543	APBD Kab
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
0522300	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			10,000,000	10,000,000		
	-								

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RPKD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
0 5 0 2 0 1 2 0 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	100,000,000	100,000,000	90,000,000	90,000,000	(10,000,000)	APBD Kab
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			-	-	-	-	-	APBD Kab
0 5 0 2 0 1 2 0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	300,000,000	305,000,000	305,000,000	305,000,000	-	APBD Kab
0 5 0 2 0 1 2 0 0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	300,000,000	305,000,000	305,000,000	305,000,000	-	APBD Kab
	Sewa gudang arsip dan barang inventaris			-	-	-	-	-	APBD Kab
0 5 0 2 0 1 2 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	475,000,000	356,250,000	386,250,000	386,250,000	30,000,000	APBD Kab
0 5 0 2 0 1 2 0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92 Stel	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	APBD Kab
	Pakaian Dinas Harian								
0 5 0 2 0 1 2 0 0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	APBD Kab
	Laporan Administrasi Kepegawaian								
0 5 0 2 0 1 2 0 0 1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	275,000,000	156,250,000	186,250,000	186,250,000	30,000,000	APBD Kab

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RKPD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
	Honorarium Pembawa Acara, Penceramah, media, honorarium instruktur senam, bimbingan teknis aparatur								
0521206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	68 Laporan	1,520,000,000	1,589,000,000	1,535,000,000	1,535,000,000	(54,000,000)	APBD Kab
05212062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	230,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	APBD Kab
	Alat Listrik dan elektronik, cinderamata								
05212063	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	APBD Kab
	Belanja alat dan bahan rumah tangga kantor, Belanja Bahan-Isi Tabung Gas, belanja penggandaan, belanja alat dan bahan rumah tangga kantor								
05212064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Laporan	230,000,000	245,000,000	245,000,000	245,000,000	-	APBD Kab
	Bahan pangan, belanja penggandaan, Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu								
05212065	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	150,000,000	165,000,000	190,000,000	190,000,000	25,000,000	APBD Kab
	Belanja cetak, Belanja Penggandaan, publikasi iklan								
05212066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Laporan	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	APBD Kab

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA				
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RKPD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG					
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13				
	Surat kabar/majalah												
0 5	0 2	0 1	2 0 6	0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	APBD Kab
	Perjalanan dinas luar daerah												
0 5	0 2	0 1	2 0 6	0 1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Laporan	25,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	APBD Kab
	Belanja alat tulis kantor, Belanja Penggandaan												
0 5	0 2	0 1	2 0 6	0 1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Laporan	200,000,000	154,000,000	75,000,000	75,000,000	(79,000,000)	APBD Kab
	Penataan ruang command center							-	-	-	-	-	APBD Kab
0 5	0 2	0 1	2 0 7	0 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	10,940,000,000	8,967,000,000	1,416,000,000	1,416,000,000	(7,551,000,000)	APBD Kab
0 5	0 2	0 1	2 0 7	0 0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	-	APBD Kab
	Pengadaan kendaraan Dinas Roda 4												
0 5	0 2	0 1	2 0 7	0 0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	9,450,000,000	7,575,000,000	-	-	(7,575,000,000)	APBD Kab
	Pengadaan kendaraan Dinas Roda 2 untuk Kecamatan, Kelurahan dan Desa												
0 5	0 2	0 1	2 0 7	0 0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	250,000,000	152,000,000	102,000,000	102,000,000	(50,000,000)	APBD Kab
	Pengadaan kursi, pengadaan meubelair												

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RKPD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
05210706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	90,000,000	90,000,000	164,000,000	164,000,000	74,000,000	APBD Kab
	Pengadaan alat kantor								
052108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	1,685,000,000	1,812,750,000	1,812,750,000	1,812,750,000	-	APBD Kab
0521082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225,000,000	243,000,000	243,000,000	243,000,000	-	APBD Kab
	Biaya tagihan internet, telepon, listrik								
0521084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,460,000,000	1,569,750,000	1,569,750,000	1,569,750,000	-	APBD Kab
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (operator/admin pengelola keuangan, SIMDA BMD, e-absensi, penatausahaan akuntansi pemerintah daerah, penganggaran, simpeg dan e-office, SP2D dan pengelolaan Dana), belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan, jasa pengemudi, belanja lembur								
052109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	1,520,000,000	875,000,000	875,000,000	875,000,000	-	APBD Kab
0521092	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Laporan	205,000,000	235,000,000	250,000,000	250,000,000	15,000,000	APBD Kab
	Belanja STNK, Suku cadang Roda 4, Suku Cadang Roda 2								

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RKPD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
0520095	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	APBD Kab
	Pemeliharaan Mebel								
0520096	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan	80,000,000	80,000,000	95,000,000	95,000,000	15,000,000	APBD Kab
	Pemeliharaan jaringan dan server, pemeliharaan komputer/laptop/printer/ac/server/arsip dan barang inventaris/barang elektronik lainnya								
0520099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Laporan	1,075,000,000	400,000,000	370,000,000	370,000,000	(30,000,000)	APBD Kab
	Pemeliharaan gedung								
0520090	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	APBD Kab
	Penataang ruangan gedung kantor								
05202	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	97%	1,650,000,000	1,041,719,900	1,041,719,900	1,041,719,900	-	APBD Kab
		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100%	2,900,000,000	1,961,280,100	1,961,280,100	1,961,280,100	-	APBD Kab
		Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	97%	610,000,000,000	179,879,295,000	179,879,295,000	179,879,295,000	-	APBD Kab
		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	97%	2,990,000,000	1,973,400,000	1,973,400,000	1,973,400,000	-	APBD Kab
052021	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen pengendalian Anggaran	12 Dokumen	1,650,000,000	1,041,719,900	1,059,569,800	1,059,569,800	17,849,900	APBD Kab
		Dokumen Perencanaan Penganggaran	6 Dokumen	2,900,000,000	1,961,280,100	1,943,430,200	1,943,430,200	(17,849,900)	APBD Kab

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RPKD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
05220011	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	325,000,000	263,284,400	263,283,550	263,283,550	(850)	APBD Kab
	Fasilitasi Pembahasan KUA dan PPAS T.A. 2024, Fasilitasi Penyusunan KUA dan PPAS T.A. 2024								
05220012	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	325,000,000	205,999,000	203,175,900	203,175,900	(2,823,100)	APBD Kab
	Fasilitasi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS T.A. 2023, Fasilitasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS T.A. 2023								
05220013	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	275,000,000	215,742,600	226,121,850	226,121,850	10,379,250	APBD Kab
	Fasilitasi Verifikasi RKA SKPD								
05220014	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	300,000,000	184,690,500	170,644,450	170,644,450	(14,046,050)	APBD Kab
	Fasilitasi Verifikasi Perubahan RKA SKPD								
05220015	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	275,000,000	228,969,000	212,634,850	212,634,850	(16,334,150)	APBD Kab
	Fasilitasi Verifikasi DPA SKPD								
05220016	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	300,000,000	176,878,000	179,029,050	179,029,050	2,151,050	APBD Kab
	Fasilitasi Verifikasi Perubahan DPA SKPD								
05220017	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	400,000,000	244,619,750	241,699,300	241,699,300	(2,920,450)	APBD Kab
	Fasilitasi Evaluasi APBD T.A. 2024, Fasilitasi Pembahasan APBD T.A. 2024, Fasilitasi Penyusunan APBD T.A. 2024								

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RPKD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
0 5 0 2 0 2 0 1 0 0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	600,000,000	327,816,750	351,411,050	351,411,050	23,594,300	APBD Kab
	Fasilitasi Evaluasi APBD T.A. 2023, Fasilitasi Pembahasan Perubahan APBD T.A. 2023, Fasilitasi Penyusunan Perubahan APBD T.A. 2023, Fasilitasi Penyusunan Perubahan Penjabaran APBD T.A. 2023								
0 5 0 2 0 2 0 1 0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	500,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	APBD Kab
	Pembuatan Audio Visual Perencanaan Penganggaran, Belanja Jasa Pihak Ketiga (Dalam Rangka ASB, Naskah Akademik, SBU, Pembuatan Audio Visual Perencanaan Penganggaran)								
0 5 0 2 0 2 0 1 0 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	250,000,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000	-	APBD Kab
	Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Perjalanan Dinas Biasa (Wilayah DKI dan Banten, Wilayah Provinsi Jawa Barat)								
0 5 0 2 0 2 0 1 1 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	500,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	APBD Kab

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA					
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RPKD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG						
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13					
	Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan Dinas Luar Provinsi, Wilayah DKI dan Banten, Wilayah Provinsi Jawa Barat)													
0 5	0 2	0 2	2 1	0 1	1 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	500,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	APBD Kab
	Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis), Belanja Sewa Gedung Bangunan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Wilayah DKI dan Banten, Wilayah Provinsi Jawa Barat)													
0 5	0 2	0 2	2 2	0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	12 Dokumen	2,700,000,000	1,782,000,000	1,782,000,000	1,782,000,000	-	APBD Kab
0 5	0 2	0 2	2 2	0 2	0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	500,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	-	APBD Kab
	Belanja Makanan dan Minuman (Dalam Rangka Evaluasi Transaksi Non Tunai, Perhitungan SILPA, rekonsiliasi penyaluran dan penggunaan dana desa, sosialisasi kebijakan penyaluran dana transfer ke desa, Verifikasi Perhitungan Uang Persediaan), Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator / Dirigen (Dalam Rangka Evaluasi Transaksi Non Tunai, sosialisasi kebijakan penyaluran dana transfer ke desa), Belanja Lembur (Dalam rangka pemrosesan SP2D)													

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RPKD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
0 5 0 2 0 2 0 2 0 0	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	350,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	-	APBD Kab
	Belanja Makanan dan Minuman (Dalam Rangka Verifikasi RAK APBD Murni, Verifikasi RAK APBD Perubahan), Belanja Lembur (Dalam Rangka Verifikasi Rencana Anggaran Kas)								
0 5 0 2 0 2 0 2 0 0	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	-	APBD Kab
	Evaluasi Belanja Dana Spesifik, evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari Bantuan keuangan Provinsi TA 2023, evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK fisik tahap II TA 2023, evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK fisik tahap I TA 2023, evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK non fisik TA 2022, evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK non fisik tahap I TA 2023, evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DID tahap I TA 2023, evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DTU semester I TA 2023, rekonsiliasi belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi TA 2022, rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK Fisik TA 2022, rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DID TA 2022, Rekonsiliasi Belanja yang Bersumber dari DTU, Fasilitasi penyaluran DAK Fisik, fasilitasi penyaluran dana desa								

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA				
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RKPD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG					
1						4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
0 5	0 2	0 2	2 0 2 0 6	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	300,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	APBD Kab	
0 5	0 2	0 2	2 0 2 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Dokumen	500,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	APBD Kab	
				Mutasi data gaji, penyusunan laporan gaji dan TPP, Rekonsiliasi Bank, rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran, verifikasi NPTN dan rekonsiliasi DTH, Belanja Jasa Konversi Aplikasi									

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA					
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RPKD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG						
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13					
0 5	0 2	0 2	2 0	0 2	1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	300,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	APBD Kab
0 5	0 2	0 2	2 1	0 2	1 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	APBD Kab
						pendampingan implementasi sistem informasi perbendaharaan, pembinaan penatausahaan belanja, Pendampingan perekaman data penatausahaan dalam SIPD, sosialisasi kebijakan penatausahaan keuangan, Sosialisasi Perbup Pedoman Percepatan Penyerapan Anggaran, workshop verifikasi dokumen kelengkapan SPM, Sosialisasi Aplikasi SIMEDOK untuk Perangkat Kecamatan,								
0 5	0 2	0 2	2 3	0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,820,000,000	1,146,700,000	1,146,700,000	1,146,700,000	-	APBD Kab
							Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	4 Dokumen	1,170,000,000	826,700,000	826,700,000	826,700,000	-	APBD Kab
0 5	0 2	0 2	2 3	0 3	0 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	200,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	-	APBD Kab
						Pembahasan Intern perhitungan SILPA TA 2022, Register Penerimaan Daerah dan Register Pengeluaran Daerah T.A 2022								

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RKPD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
0 5 0 2 0 2 0 3 0 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	275,000,000	181,500,000	181,500,000	181,500,000	-	APBD Kab
	Rekonsiliasi Laporan Realisasi APBD, Laporan Operasional dan Neraca T.A 2023								
0 5 0 2 0 2 0 3 0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	320,000,000	211,200,000	211,200,000	211,200,000	-	APBD Kab
	Konsolidasi LRA Bulanan								
0 5 0 2 0 2 0 3 0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Dokumen	375,000,000	262,000,000	262,000,000	262,000,000	-	APBD Kab
	Laporan Keuangan Audited TA 2022, Laporan Keuangan BUMD, Laporan Keuangan Unaudited TA 2022, Publikasi LKPD TA 2022 di Media.								
0 5 0 2 0 2 0 3 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	275,000,000	221,500,000	221,500,000	221,500,000	-	APBD Kab

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RKPD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
	Penyusunan Rancangan Perda dan Perbup tentang P2APBD, Hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Perda dan Perbup tentang P2APBD dan Perda tentang P2APBD, Perbup tentang Penjabaran P2APBD TA. 2022								
0520200	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	100,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	APBD Kab
	Tindak Lanjut Jurnal Koreksi								
0520200	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	175,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	APBD Kab
	-								
0520200	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	175,000,000	115,500,000	115,500,000	115,500,000	-	APBD Kab
	Penyusunan Analisa Laporan Keuangan Pemda								
0520201	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	595,000,000	392,700,000	392,700,000	392,700,000	-	APBD Kab
	Sinergitas Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah								
0520201	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	225,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	APBD Kab
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA				
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RKPD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RKPD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG					
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13				
0 5	0 2	0 2	2 0 3	1 3	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	275,000,000	247,000,000	247,000,000	247,000,000	-	APBD Kab
					Penyusunan buku Saku Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, penyusunan Profil Keuangan Daerah, pembuatan Aplikasi Klinik Akuntansi								
0 5	0 2	0 2	2 0 4	0 4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Dokumen	607,300,000,000	178,097,295,000	423,228,021,000	423,228,021,000	245,130,726,000	APBD Kab
0 5	0 2	0 2	2 0 4	0 7	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah dokumen kebijakan dan alokasi subsidi	1 Laporan	-	810,000,000	810,000,000	810,000,000		APBD Kab
					Program KURDA untuk usaha mikro yang bergerak di sektor produktif								
0 5	0 2	0 2	2 0 4	0 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	469,656,090,187	123,000,000,000	368,130,726,000	368,130,726,000	245,130,726,000	APBD Kab
					Alokasi Dana Desa Dana Desa Bankeu Khusus								
0 5	0 2	0 2	2 0 4	0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	101,794,934,046	24,800,000,000	24,800,000,000	24,800,000,000	-	APBD Kab
					Belanja Tidak Terduga (Kesehatan) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga(Pajak Rokok)								
0 5	0 2	0 2	2 0 4	0 1 0	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	35,848,975,767	29,487,295,000	29,487,295,000	29,487,295,000	-	APBD Kab
					Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa								

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RPKD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
5 0 0	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91%	2,039,445,000	3,141,600,000	3,141,600,000	3,141,600,000	-	APBD Kab
5 0 0 2 0	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	26 Dokumen	2,039,445,000	3,141,600,000	3,141,600,000	3,141,600,000	-	APBD Kab
5 0 0 2 0 0	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	423,500,000	299,510,000	299,510,000	299,510,000	-	APBD Kab
	Penyusunan SSH, HSPK Tahun 2024								
5 0 0 2 0 0	Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	60,500,000	-	-	-	-	APBD Kab
	-								
5 0 0 2 0 0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	33,000,000	41,710,000	41,710,000	41,710,000	-	APBD Kab
	Pembahasan RKBMD dan RKPBMMD								
5 0 0 2 0 0	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	84,700,000	-	-	-	-	APBD Kab
	Kerjasama dengan kejaksaan								
5 0 0 2 0 0	Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	169,400,000	111,804,000	111,804,000	111,804,000	-	APBD Kab
	Konversi Aplikasi/Sistem Informasi, Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei								
5 0 0 2 0 0	Inventarisasi barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	60,500,000	95,832,000	95,832,000	95,832,000	-	APBD Kab
	Perjalanan Dinas Dalam Kota								
5 0 0 2 0 0	Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	450,000,000	2,108,538,300	2,108,538,300	2,108,538,300	-	APBD Kab
	Sertifikasi Barang Milik Daerah ± 1500 Sertifikat								

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF(Rp)					SUMBER DANA
				PAGU RANCANGAN AWAL RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN RENJA/ RPKD	PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA/ RPKD	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8 - 7	13
5 0 0 2 0 0 2 3 1 8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	187,550,000	123,783,000	123,783,000	123,783,000	-	APBD Kab
	Penilai Bangunan yang dibongkar, Tim Survey penilaian yang di rehab, Konsultansi Penilaian Barang Milik Daerah								
5 0 0 2 0 0 2 3 1 9	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	96,195,000	63,488,700	63,488,700	63,488,700	-	APBD Kab
	Pengawas dan pengendalian dari kejaksaan								
5 0 0 2 0 1 2 3 1 0	Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Daerah Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	159,500,000	105,270,000	155,270,000	155,270,000	50,000,000	APBD Kab
	Pembentukan Tim, Pembahasan dan proses lelang penghapusan, Pemindahtanganan BMD								
5 0 0 2 0 1 2 3 1 1	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	121,000,000	79,860,000	79,860,000	79,860,000	-	APBD Kab
	Belanja lembur, evaluasi rekonsiliasi								
5 0 0 2 0 1 2 3 1 2	Penyusunan Laporan Barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	24,200,000	-	-	-	-	APBD Kab
	-								
5 0 0 2 0 1 2 3 1 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	169,400,000	111,804,000	61,804,000	61,804,000	(50,000,000)	APBD Kab
	Kursus Singkat/Pelatihan			-	-	-	-	-	
	JUMLAH			766,429,445,000	385,048,717,332	742,508,772,875	385,048,717,332	714,900,111,086	

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang harus memiliki rencana kerja yang dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditopang oleh sumber daya manusia yang profesional.

Sehubungan hal tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 serta Rencana Strategis BKAD Tahun 2018-2023.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset di Kabupaten Sumedang sehingga indikator kinerja utama yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan, WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan penetapan APBD tepat waktu dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Namun demikian keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta masyarakat. Dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja ini, diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Rencana kerja tahun 2023 merupakan rangkaian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 beserta jumlah pagu anggaran yang dibutuhkan. Apabila dalam perjalanan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran, maka akan dilaksanakan evaluasi agar kegiatan tetap dapat berjalan dengan anggaran yang tersedia namun tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja tahun 2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023. Seluruh unsur penyelenggara program perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda sebagaimana tertuang dalam rencana kerja ini.

Dengan demikian, diharapkan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparaturnya di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan program

dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sumedang di tahun mendatang.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, tanggapan dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian, mudah-mudahan rencana kerja yang telah disusun dapat direalisasikan sesuai dengan harapan.

Sumedang, Juli 2022
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang



Ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc

Pembina TK.I/ IV.b

NIP. 19690315 199901 2 001